



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 104/TAPEM TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform tahun 2023, tanah yang menjadi objek redistribusi dan dibagikan kepada calon subjek redistribusi tanah adalah tanah yang berasal dari tanah negara, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan sebagai calon subjek redistribusi tanah menjadi subjek redistribusi tanah dengan keputusan bupati;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
 2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
 5. Berita Acara Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Bungo, Nomor 282/BA-15.08.02.03/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 08/SK-15.NP.02.03/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi tanah objek redistribusi yang terletak di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor NT.02.03/740-15.08/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 Perihal Usulan Pengesahan Calon Subjek Redistribusi Tanah menjadi subjek redistribusi tanah.

MEMUTUSKAN:

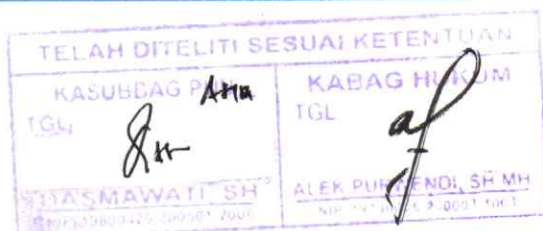
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
- KESATU : Subjek redistribusi tanah di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI BUNGO,



TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : Agustus 2023	TGL : Agustus 2023
9	
ZAMRONI, S.Sos. NIP. 19790210 200312 1 004	S. ANDI SANDRI ALHABSYL, S.STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 204/ TAPEM TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

NO	NOMOR URUT BIDANG	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	ADI SUYITNO	05/11/1984	39	Petani / Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	4882
2	2	AGUS HIDAYAT	10/07/1997	26	Pelajar / Mahasiswa	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	1809
3	3	AGUS SUPANTO	17/06/1960	63	Karyawan Swasta	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	1552
4	4	AGUS TRIONO	17/08/1979	44	Wiraswasta	Desa Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	6937
5	5	AHMAD TOHA	28/01/1977	46	Petani/Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	4114
6	6	AKHIRMAN	17/08/1976	47	Petani / Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	5320
7	7	ARIFIN S	20/02/1954	69	Petani	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	5564
8	8	ASEP WAHYUDIN	10/05/1977	46	Petani/Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	23130
9	9	ASNI (1)	01/07/1972	51	Mengurus Rumah Tangga	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	4161
10	10	ASNI (2)	01/07/1972	51	Mengurus Rumah Tangga	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	9745
11	11	BUDI ASMARA	02/04/1974	49	Sopir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	671
12	12	DEDE HARIYANTI	09/06/1988	35	Mengurus Rumah Tangga	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	5069
13	13	DENI ROMANSYAH	11/11/1985	38	Petani / Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	15890
14	14	DENI SULAIMAN	03/02/1981	42	Petani / Pekebun	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	9140
15	15	DESTRI SITI ROJANAH	28/12/1993	30	Mengurus Rumah Tangga	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	878
16	16	DEVI EKA SAPUTRA	20/01/1992	41	Wiraswasta	Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	13540
17	17	DIAN DWI KURNIA	25/08/2001	22	Belum / Tidak Bekerja	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	3078
18	18	DIAN HOTMAN PERMANA SIMARMATA	28/05/1992	31	Dokter	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Lingga Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir	4871

NO	NOMOR URUT BIDANG	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	208	KOKON	08/03/1976	47	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	12090
209	209	MAMAT	12/02/1972	51	Tukang Kayu	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	9572
210	210	MUHAMMAD LATIF	09/11/1988	35	Wiraswasta	Desa Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	5201
211	211	MUKHAINI	03/01/1981	42	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	4172
212	212	NUR LENA	05/10/1993	30	Mengurus Rumah Tangga	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	7145
213	213	NURTAJI	01/07/1946	77	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	5928
214	214	RENDI EXSONTO	27/01/2003	20	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	6469
215	215	RISWANTO	02/07/1980	43	Wiraswasta	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	9009
216	216	SUJIYO	06/07/1984	39	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	9187
217	217	SUKARDI	07/04/1970	53	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	7576
218	218	SUKARDI	04/02/1975	48	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	9232
219	219	SUTARTO	13/11/1963	60	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	5656
220	220	SYAHRIL	10/11/1971	52	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	6026
221	221	TARJA SUTARJA	26/10/1972	51	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	8632
222	222	TOFIK YUSUP	13/01/1996	27	Wiraswasta	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	5982
223	223	TUGINO	19/10/1966	57	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	7303
224	224	WATNO	03/11/1989	34	Petani / Pekebun	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat	7888

TELAH DITELITI SESUAI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TGL : Agustus 2023	TGL : Agustus 2023
ZAMRONI, S.Sos.	S. ANDI SANDRI AL HANSYI, S.STP., ME.
NIP. 19790210 200312 1 004	NIP. 19791010 199912 1 001

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PRAK	KABAG HUKUM
TGL	TGL
DASMAWATI, SH	ALEK PURNENDU, SH, MH
NIP. 19700101 196703 1 001	NIP. 19700101 196703 1 001

